

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PENENUN
TRADISIONAL di KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**

TENRI SUMPALA

Nomor Stambuk : 105610468013



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PENENUN
TRADISIONAL DI KECAMATAN TANASITOLLO KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

TENRI SUMPALA

Nomor Stambuk : 105610468013

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

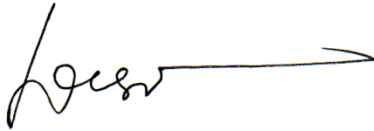
Nama Mahasiswa : Tenri Sumpala

Nomor Stambuk : 105610468013

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

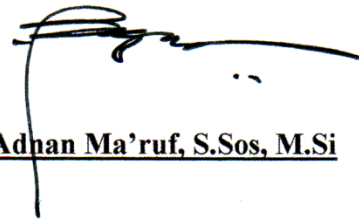
Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. Djuliati Saleh, M.Si

Pembimbing II



Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0014/FSP/A.1-VIII/1/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)
2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si
4. Nasrulhaq, S.Sos, M.PA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ternri Sumpala

Nomor Stambuk : 10561 04680 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Desember 2017

Yang menyatakan,

Ternri Sumpala

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PENENUN TRADISIONAL di KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

Tenri Sumpala¹, Djulianti Saleh², Adnan Ma'ruf³

¹Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The objective of this study is to investigate the role of the government in empowering traditional weavers. The type of research is qualitative with descriptive research type. The data were collected through interviews, observations, and documents. The findings of this research indicated that the coordinator is not maximal because the training schedule of Integrated Service Unit is uncertain. The facilitator and the stimulator have been well-realized due to the guidance and the provision of exhibition venue and brochure creation. The internal factors such as institutions and human resources have been realized well due to workshop, training and socialization. Marketing, technology and intellectual capital have not been optimal due to the weavers' lack of technology understanding. The external factors such as infrastructure have been realized well because of the provision of facilities and infrastructure of the Industry and Cooperative Service Department.

Keywords: *Government role, Empowerment*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni berupa wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian ini yaitu koordinator belum maksimal karena jadwal pelatihan oleh unit pelayanan terpadu tidak menentu. Fasilitator serta stimulator sudah terealisasi dengan baik karena adanya pembinaan, penyediaan tempat pameran dan pembuatan brosur. Faktor internal yakni kelembagaan dan sumber daya manusia sudah terealisasi dengan baik karena adanya workshop, diklat dan sosialisasi. Pemasaran, teknologi dan modal intelektual belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat penenun mengenai teknologi. Faktor eksternal yakni infrastruktur sudah terealisasi dengan baik karena adanya penyediaan sarana dan prasarana dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi.

Kata Kunci: Peran pemerintah, Pemberdayaan

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.m selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fasipol Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf FASIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Para pihak Dinas Perindustrian yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Para Pihak Dinas Koperasi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Buat saudara-saudariku tercinta, teman-temanku serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi serta bantuan yang tak ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Juli 2017

Tenri Sumpala

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peran Pemerintah	6
B. Fungsi dan Tugas Pemerintah	13
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
D. Strategi Pemberdayaan	20
E. Kerangka Pikir	25
F. Fokus Penelitian	25
G. Deskripsi fokus Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian	37
B. Karakteristik Informan	47
C. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional Di Kecamatan tanasitolo Kabupaten Wajo	50
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Penenun Tradisional Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo	65

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Daftar Gambar	Halaman
	Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	28

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 2.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur	48
Tabel 3.	Karakteristik Informan Berdasarkan Umur	48
Tabel 4.	Karakteristik Informan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 5.	Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan	49
Table 6.	Data Usaha Tenun Tradisional	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa adalah “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Industri kecil di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional, karena berperan dalam mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan berperan dalam peningkatan perolehan devisa serta memperoleh struktur industri nasional (Jumhur, 2001 : 55).

Pengembangan sutera Sulawesi Selatan, JICA (*Japan International Cooperation Agency*) – RDPLG (*Regional Development Policies for Local Government*) bekerjasama dengan Bappeda Sulsel telah menyusun konsep kerjasama Pembangunan Industri Sutera Alam dan Industri Sutera di Sulsel. Kerjasama tersebut melibatkan empat Kabupaten masing-masing Kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap dan Wajo (Haris: 2003).

Indonesia adalah negara yang kaya akan produk-produk yang layak bersaing di pasar internasional, salah satunya adalah Sarung Sutera. Sarung Sutera yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Wajo masih tetap dipilih setiap orang yang berkesempatan berkunjung atau sekedar memesan cendera mata yang berasal dari Kota Sengkang. Hal ini tidaklah berlebihan karena memang sejak dulu, produk sutera dari Wajo dikenal memiliki ciri khas dan kualitas yang istimewa. Keunggulan Kabupaten Wajo tidaklah terlepas dari para pelaku usaha persuteraan yang memiliki prinsip yaitu mempertahankan tradisi secara dinamis tetapi tetap mem buka diri untuk menerima inovasi teknis yang dianggap berguna yang dilandasi ketekunan dan pantang menyerah dalam menjalankan profesinya.

Kain tenun sutera Sulawesi Selatan, disebut juga Lipa' Sabbe yang dalam bahasa Bugis, Lipa' berarti sarung dan Sabbe berarti sutera. Pada umumnya proses pembuatan benang sutera menjadi kain sutera masih menggunakan alat tenun tradisional yaitu alat tenun gedongan. Ada dua jenis kain tenun di Sulawesi Selatan yang sangat terkenal, kain sutera Bugis-Sengkang yang berasal dari suku Bugis, dan kain tenun Sutera Mandar yang berasal dari suku Mandar. Walaupun sama-sama terbuat dari sutera dan dibuat dengan teknik menenun, terdapat

perbedaan antara kain tenun sutera Bugis-Sengkang dan kain tenun sutera Mandar yaitu pada motif yang menjadi kelebihan dari tenun sutera Bugis-Sengkang adalah proses memproduksinya. Untuk menghasilkan tenun sutera Bugis-Sengkang, pengrajin memelihara dan mengembangkan sendiri ulat sutera untuk menghasilkan benang sutera. Benang sutera yang dihasilkan pun merupakan hasil persilangan antara ulat sutera Cina dan ulat sutera Jepang sehingga hasil tenun sutera Bugis-Sengkang lebih halus, mengkilat dan tahan lama.

Kecamatan Tanasitolo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, dimana sebagian penduduknya berprofesi sebagai pengrajin kain sutera. Dalam melakukan produksi, pengusaha terkadang mendapatkan kendala dalam memproduksi kain sutera utamanya pada faktor-faktor produksi.

Berdasarkan hasil pengamatan sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain; terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dasar pengrajin dalam mengkreasikan motif, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat serta kesulitan memasarkan kain sutera pada pasar domestik apalagi pada pasar internasional.

Sepanjang perjalanan persuteraan di Kabupaten Wajo sudah mengalami tantangan dan masa-masa sulit sebagaimana sektor usaha yang lainnya namun karena prinsip yang selalu di pertahankan oleh para pelaku keuletan dan loyalitas mempertahankan profesinya dengan melakukan berbagai upaya pengembangan dan inovasi yang berguna menyebabkan mereka mampu eksis sehingga saat sekarang ini.s

Berdasarkan dari data yang dikutip dari situs resmi pemerintah Kabupaten Wajo (<http://www.wajoka.go.id>) permasalahan yang masih di jumpai yaitu di

antaranya masih belum berjalannya dengan baik organisasi yang menghimpun pengusaha persuteraan; belum tertatanya dengan baik pemasaran produk sutera utamanya dalam pemasaran luar daerah.

Melihat tantangan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya dari segenap stakeholder persuteraan yang ada baik pengrajin atau pengusaha persuteraan maupun instansi pemerintah dan lembaga pemberdayaan lainnya untuk berkomitmen dalam mencari solusi pemecahan permasalahan tersebut diatas dengan mengutamakan kepentingan persuteraan dan nama baik Kabupaten sebagian daerah penghasil produk sutera yang berkualitas. Akhirnya dengan niat dan komitmen dan kebersamaan untuk kepentingan kemajuan persuteraan di Kabupaten Wajo diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dan kontribusi peningkatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sengkang yang merupakan ibu Kota Kabupaten Wajo, letaknya kurang lebih 250 km dari Kota Makassar. Sejak dulu dikenal sebagai Kota Niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, tas, barang elektronik dan lain sebagainya yang kini memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah lainnya, sehingga tidak mengherankan jika Sengkang menjadi salah satu Kota dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dalam pemberdayaan penenun tradisional dan dalam hal ini salah satu daerah yang menjadi sampel lokasi penelitian adalah Kabupaten Wajo Kecamatan Tanasitolo Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul “**Peran**

Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan pengusaha penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan analisis dan kajian peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Sebagai bahan literatur untuk peneliti lain yang hendak meneliti objek yang sama.

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi ilmiah tentang cara pembuatan kain sutera.
2. Menambah ilmu dan pengetahuan khususnya dibidang kerajinan tenun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and set of expectations applied to role incumbents of a particular position which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Purwanto, 2003:54).

Menurut Dougherty & Pritthd (1985) dalam Purwanto (2003:55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Biasanya dalam sebuah organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebut yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua alasan kuat mengapa satuan kerja fungsional demikian perlu dibentuk. Pertama, meskipun bahwa setiap manajemen yang bersangkutan disertai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, baik yang sifatnya tugas pokok maupun menunjang, sehingga perhatian utamanya ditujukan kepada tanggung jawab fungsional itu. Kedua, dewasa ini manajemen sumber daya manusia mutlak perlu ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga spesial

karena hanya dengan demikianlah manajemen sumber daya manusia sangat kompleks itu dapat ditangani dengan baik, Sondang (2001:31).

Secara umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau suatu pekerjaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan suatu aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, umumnya mungkin jelas dan mungkin juga tidak jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peran seseorang (Sedarmayanti, 2004:33).

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekamto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekamto (2009:213), mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sumodiningrat (2005:55), peran pemerintah terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan UKM antara lain :

1. Enterpreniur

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk merangsang jalannya suatu bisnis seperti dalam hal mengenai produk baru, menentukan produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produksi baru dan mengatur permasalahan operasi.

2. Koordinator

Pemerintah Daerah sebagai koordinator dalam usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengerahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

3. Fasilitator

Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan tradisional (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya dan pengaturan penetapan tata ruang daerah yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuhkembangkan investor yang telah ada didaerahnya, seperti pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan tempat-tempat usaha untuk produk-produk usaha dan koperasi, dan membantu usaha dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

Pemerintah atau "*Government*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: "*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.*". Atau berarti dalam bahasa Indonesia "Pengarah dan administrasi dan berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya". Bisa juga berarti "*The governing body of a nation, state, city, etc.*". Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya". (Sedarmayanti:2004).

Usman (2003:8), pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat.

Syafii (2011:6-7), membedakan secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah tajam lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

Sementara itu Finer dalam Syafii (2003:24-25), mengemukakan bahwa istilah “*goverment*” paling sedikit mempunyai 4 arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai (*states of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people chargewidth the duty f governing*).

Pemerintah bukanlah memberikan atau menciptakan petunjuk teknis untuk memerintah, tapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana seharusnya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar. Memahami tentang pemerintahan berarti kita dapat melepaskan diri dari pemahaman organisasi, karena pemerintahan sendiri merupakan sekumpulan orang yang melakukan kerjasama yang didasarkan kepada rasionalitas, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2009:8).

Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat istilah publik *governance*, *privati governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. *Governance* sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (Sedarmayanti 2004).

Menurut Taliziduhu Ndaraha (2008:18), pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif. Dan pemerintahan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan diluar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon menurut Djohani (2003:3), lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,
2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,
3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa,
4. Sifatnya lebih desantralistik.

CF Strong dalam Djohani (2003:247), memberikan makna pemerintahan sebagai pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan dibidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan Undang-Undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mancukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan kepentingan negara.

Bayu Suryaningrat dalam Suroso (2007:2), bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan :

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan,
2. Adanya dua pihak, yaitu memberi perintah dan yang menerima perintah,
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah,
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan Rasyid dalam Suroso (2007:2), mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bagi kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori (Sedarmayanti 2004) yaitu :

1. Negara/Pemerintah

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

3. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah negara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

B. Fungsi dan Tugas Pemerintah

Menurut Taliziduhu (2011:89), dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia perlu bekerja sama, dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol sebagai aktivitis dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Rewansyah dalam Akbar (2016, 19-21), mengungkapkan bahwa secara umum pemerintah memiliki lima fungsi/peranan utama eksekutif (pemerintah) yaitu :

1. Fungsi Pengaturan/Regulasi

Fungsi pengaturan/regulasi (penetapan keijakan publik/negara) adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. Kebijakan tersebut dapat berupa tertulis dan tidak tertulis, kebijakan-kebijakan pemerintahan Negara perlu dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti suatu "*national legal drafting system and procces*" dan dituangkan dalam aturan perundang-undangan yang tepat sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta jelas keterkaitan dan kesesuaiannya satu sama lain, dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pemegang kedaulatan rakyat.

2. Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat

Menurut Ryass Rasyid dalam buku makna pemerintahan itu tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan dalam Rivai (2010:27), ada tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*Empowertment*), dan pembangunan (*Development*). Fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi.

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial warga masyarakat dalam arti semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*) semakin *integrative* masyarakat. Pemberdayaan terus menerus, komperhensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan warga masyarakat.

4. Fungsi Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara

Aset atau Kekayaan Negara adalah tak lain merupakan sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik Negara Indonesia yang dikelola/diurus oleh pemerintah. Sumber daya alam dewasa ini sudah menjadi komoditas politik baik di dalam maupun ke luar.

Menurut Fahmi (2011:113), pengelolaan sumber daya adalah penataan barang-barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari setahun (inventaris) maupun barang pakai habis yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan/penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan/pelanggan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

5. Fungsi Keamanan

Fungsi pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan pengamanan serta perlindungan sudah termasuk dan terkait dengan fungsi pemerintah di bidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan,

pemberdayaan, dan fungsi pengelolaan aset/kekayaan negara. Misalnya, fungsi keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas aparaturnya kepolisian yang dapat juga dirumuskan sebagai fungsi pelayanan keamanan dan ketertiban umum kepolisian.

Menurut Nigraha (2000:85), fungsi pemerintahan tersebut ada dua macam yaitu :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*) sebagai provider jasa publik yang diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Rasyid dalam Nurwana (2003:13), bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga dan non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan kesektor kegiatan yang produktif dan sebagainya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antara bangsa serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan telah didefinisikan dengan berbagai pendapat. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*pople-centered, participatory, empowering and sustainable*” (Kartasmita:2005).

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “*impowerment*” yang dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar daya tapi juga kekuasaan sehingga kata “*daya*” tidak saja bermakna “mampu” tapi juga bermakna “mempunyai kekuasaan” (Wrihartnolo dan Dwijowitono:2007).

Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat, strategi kebijakan yang diambil adalah (Fahmi, 2011: 12) :

1. Membangun kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi-produktif secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak.
3. Meningkatkan upaya pemihakan bagi masyarakat miskin dengan menciptakan iklim ekonomi, pengembangan sektor ekonomi real.
4. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Schuler, Hashemidan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto,2004) yaitu :

1. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak,shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik, mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seseorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan social, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

D. Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi suatu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber

atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras matra pemberdayaan (*empowerment setting*); mikro, mezzo dan makro (Edi Suharto 2010:66) :

1. Aras Makro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, *konseling*, *stress manajemen*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini seiring disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat., manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Stratesi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk

memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

E. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tentang hal ini, Tim Delivery (2004) menawarkan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses koleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap pertama: Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

Tahap kedua: Sosialisasi, merupakan upaya mengkonsumsikan kegiatan untuk mencaai dialog dengan masyarakat, mellaui sosialisasi akan membanu meningkatkan pemahaman masarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

Tahap ketiga: hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama-sama melakukan hal-hal berikut: mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik potensi

maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial ini meliputi : (a) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya, (b) persiapan dan penyelenggaraan dan pertemuan, (c) pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan dan (d) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi: (a) memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah, (b) identifikasi alternative pemecahan masalah yang terbaik, (c) identifikasi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah, (d) pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan, pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Tahap keempat: pemandirian masyarakat berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan tahap hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat

penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu eksternal faktor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat, kapan waktu pemunduran fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengalaman dilaporkan bahwa tim fasilitator dapat dilakukan dalam minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penasehat atau konsultan apabila diperlukan oleh masyarakat. Secara skematis, mekanisme pembagian peran menurut periode antara tim PM dan kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kegiatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Wilantara (2016:24), ada dua faktor yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini yang berkaitan dengan internal yaitu :

A. Faktor Internal

1) Kelembagaan dan SDM

Upaya membangun UMKM tidak lepas dari masalah kelembagaan dan SDM. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha menjadi tonggak utama dan memajukan UMKM. Masalah SDM tentu berimplikasi pada mutu kelembagaan UMKM. Kecilnya akses produk barang dan jasa ke pasar ekspor tidak lepas dari masalah kelembagaan. Berdasarkan pandangan ekonomi kelembagaan, kesehatan kelembagaan UMKM idealnya memiliki ciri-ciri berpegang pada aturan main, memiliki asa legalitas yang kuat, baik lembaga maupun kegiataannya, memiliki kemampuan membiayai operasional usaha sesuai dengan skalanya dan memiliki jaringan ke dahulu dan hilir sama baiknya.

2) Pemasaran dan teknologi

Tuntutan untuk mengikuti standar, desain dan kualitas produk agar sesuai ketentuan, menuntut perubahan dalam kegiatan produksi dan pemasaran. UMKM sering terhambat masalah karena disebabkan antara lain produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sulit distandarisasi, pemahaman dan penguasaan teknis implementasi standar dalam produksi, penguasaan teknologi dalam produksi terbatas, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tidak mendorong UMKM untuk melaksakan diri dan konsumen lokal cenderung masih belum kritis tentang standarisasi mutu.

Selain masalah kegiatan produksi masalah pemasaran masih menghadapi salah pemasaran bersumber dari mutu kemasan, promosi, inovasi, dan penetapan strategi harga, ataupun pemanfaatan saluran pemasaran termasuk penguasaan teknologi informasi untuk kepentingan pemasaran. Semua ini berasal dari belum optimal fungsi bidang *research and development* dan terbatasnya modal intelektual yang dimiliki.

3) Modal intelektual

Pada abad XXI ini muncul *information society dan knowledge base society* yang menempatkan “*knowledge*” menjadi sumber daya yang lebih “*powerful*” dibandingkan kapital dan sumber daya alam. Peran informasi sebagai input sekaligus output dari iptek menjadi penting dalam era *knowledge-based economy*. Penguasaan teknologi informasi

merupakan bentuk modal intelektual masih sangat terbatas dimanfaatkan oleh UMKM. Sistem yang berbasis pada jaringan (*network*) menjadi komponen dalam menentukan kesuksesan bisnis di era globalisasi, namun faktanya masih terbatas dimanfaatkan dan masih lemah dikuasai oleh para pengusaha.

B. Faktor eksternal

1) Layanan Birokrasi

Sebagaimana diungkap tentang hambatan utama bagi dunia usaha adalah korupsi. Birokrasi merupakan akar masalah korupsi. Masalah korupsi tentu berkaitan langsung dengan mutu birokrasi. Tingginya angka indeks persepsi korupsi, bukan semata masalah personal, melainkan impersonal, bukan sudah menjadi masalah institusional. Masalah institusional sudah merambat ke daerah. Kapasitas kelembagaan daerah terkait dengan pelaksanaan otonomi ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki kapasitas yang relatif masih rendah. Kondisi birokrasi seperti ini membuat prosedur dan amannya layanan masih belum ideal bagi dunia usaha.

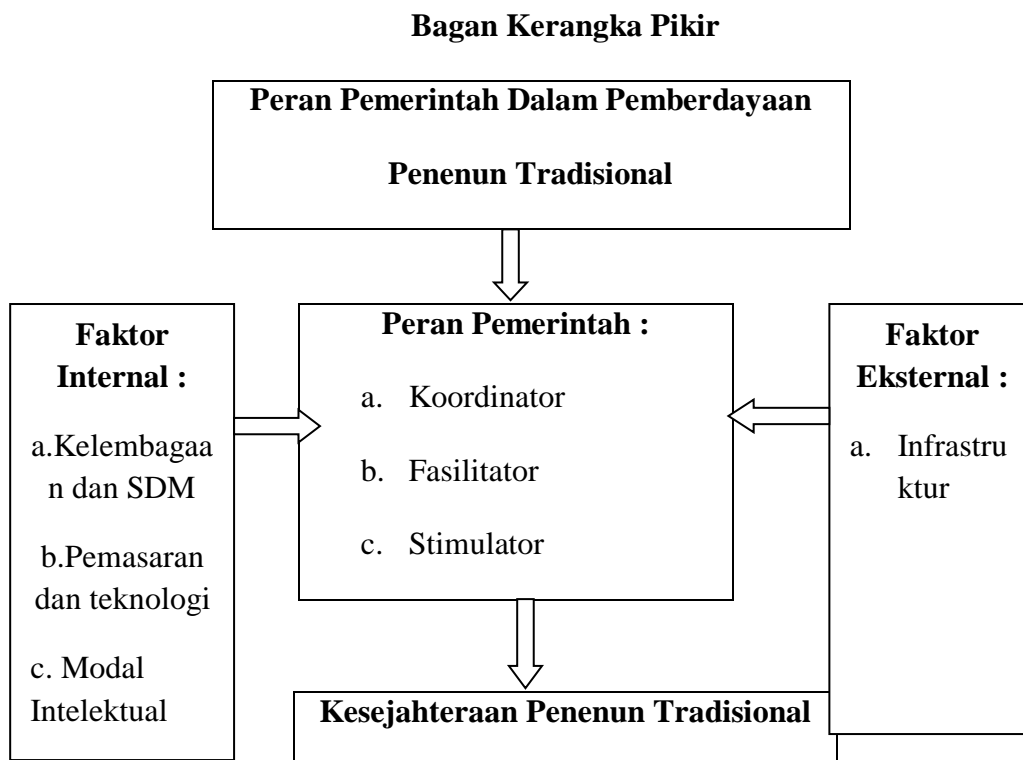
2) Infrastruktur

Infrastruktur mempunyai pengaruh positif terhadap gerak laju UMKM karena sarana dan prasarana infrastruktur mempunyai peran strategis dalam proses produksi, distribusi, ataupun pemasaran. Infrastruktur sebagai bagian dari modal fisik tidak kalah penting dari modal lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan peningkatan infrastruktur adalah masalah pendanaan dan permasalahan hukum.

F. Kerangka Pikir

Beberapa teori yang terkait dengan kajian mengenai peranan pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional dalam hal ini yang menjadi objek yang diteliti menurut Sumodiningrat (2005:55) yaitu : (a) Enterpreniur, (b) Koordinator, (c) Fasilitator, (d) Stimulator. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan menurut Wilantara (2016:24) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut dibawah ini :



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kabupaten Wajo Kecamatan Tanasitolo. Pemberdayaan penenun tradisional yang dimaksud yakni meningkatkan kesejahteraan penenun tradisional di Kabupaten Wajo Kecamatan Tanasitolo dan adapun faktor internal dan eksternal pada peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penenun.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Koordinator adalah Pemerintah Daerah sebagai koordinator dalam usaha tenun sehingga menghasilkan produk sesuai dengan keinginan para konsumen.
2. Fasilitator adalah Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan kepada masyarakat penenun sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas lagi.
3. Stimulator adalah Pemerintah Daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam pengembangan usaha agar masyarakat bisa mempertahankan serta menumbuhkembangkan investor yang telah ada di Kecamatan Tanasitolo seperti pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan tempat-tempat usaha untuk produk-produk usaha dan koperasi, dan membantu usaha dan koperasi untuk melakukan pameran dan sebagainya.

4. Kesejahteraan Penenun Tradisional

Kesejahteraan masyarakat penenun tradisional apabila semua masalah yang dihadapi berjalan sesuai yang diharapkan sehingga kehidupan masyarakat penenun lebih meningkat dari sebelumnya.

5. Internal

Tidak lepas dari masalah kelembagaan dan SDM karena masih kurangnya akses produk barang dan jasa ke pasar ekspor dan kurangnya pengetahuan masalah pemasaran melalui teknologi informasi.

6. Faktor Eksternal

Tidak lepas dari masalah yang datang dari luar seperti letak lokasi tenun masyarakat Kabupaten Wajo yang sulit dijangkau, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui cara pemasaran kain tenunnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan selama dua bulan yakni bulan mulai 12 Mei sampai dengan 12 Juli setelah seminar pra penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi Kabupaten Wajo. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo masih banyak penenun yang belum merasakan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian data kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kabupaten Wajo Kecamatan Tanasitolo.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena social tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi) dan wawancara yang dilakukan berasal dari informan-informan yang terlibat langsung mengenai pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui berbagai dokumen-dokumen mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti sesuai yang diharapkan dan mendapatkan data yang akurat dan akuntable di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo:

Tabel 1 : Data Informan Penelitian

No	NAMA INFORMAN	INISIAL	JABATAN INFORMAN	JUMLAH
1.	Drs. H. Syarifuddin, M.M	SY	Kepala Dinas Perindustrian	1
2.	M. Arwes, S. E, M. Si	AR	Kepala Dinas Koperasi	1
3.	Indah Seri Rejeki Tjarbo, ST. M. Si	IN	Bidang Pembinaan industri Kecil dan Menengah	1
4.	Ayu Lestari	AL	Mayarakat Penenun	1
5.	Indo Tang	IT	Masyarakat Penenun	1
6	Ramli	RA	Penyuluh	1
7	Nemmi	NM	Masyarakat Penenun	1
	Jumlah			7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Di samping itu, observasi dilakukan untuk mendapatkan data sekiranya terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan sebelumnya.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui

interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan. Dengan wawancara beberapa informan maka dapat diketahui dengan jelas wilayah Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, tujuan, visi dan misinya, prestasi, perkembangan, kendala dan hasil yang diperoleh.

Metode penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dianggap penting (*stakeholder*) dari Pemerintah Sengkang Kabupaten Wajo, Dinas Perindustrian Dan Dinas Koperasi Kabupaten Wajo serta masyarakat penenun itu sendiri.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen hasil penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan alat digunakan oleh peneliti untuk mengolah data menjadi hasil penelitian dimana data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dimana dalam teknik analisis data ada 3 komponen yang harus diperhatikan yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu merangkum dan menfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. Penyajian Data

Yaitu merupakan salah satu dari teknik analisis data. Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan

menyusun informasi sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti dalam hal ini Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Bentuk penyajian data dapat berupa catatan lapangan grafik dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka lakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti menguraikan secara singkat tentang gambaran umum mengenai Kabupaten Wajo lebih tepatnya di Kecamatan Tanasitolo menjadi tempat atau lokasi penelitian.

1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo

Berdasarkan data statistik Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo dengan ibukotanya Sengkang, terletak dibagian tengah provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3 39-16 LS dan 119 53-120 27 BT. Luas wilayahnya sekitar 2.506,19 km, atau 86.142Ha (34,37%) dan lahan kering 164,447 Ha (65,63%).

Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap,

Sebelah selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng,

Sebelah Timur : Teluk Bone, dan

Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Secara administratif, terbagi menjadi 14 Kecamatan yang meliputi 131 Desa dan 14 Kelurahan. Karakteristik dan potensi lahan Kabupaten Wajo memiliki tiga dimensi yaitu: tanah berbukit sampai bergunung berupa hutan dan tanaman industri, perkebunan kakao, cengkeh, jambu mete serta penggembalaan ternak; tanah dan dataran rendah berupa hamparan sawah dan perkebunan/tegalan; serta laut yang potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak. Selain itu, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan yang potensial bagi pengairan dan penyediaan air bersih.

a. Visi

Menjadikan Kabupaten Wajo sebagai Kabupaten terbaik dalam pelayanan hak dasar dan pemerintah yang profesional.

b. Misi

Penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya aparatur, meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam proses pemenuhan hak dasar masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang aman, damai, religius dan inovatif serta implementasi pemberdayaan masyarakat, mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi berbasis ekonomi kerakyatan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo

a. Letak Wilayah

Kecamatan Tanasitolo merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di

Kabupaten Wajo dengan ibukotanya Baru Tancung yang berjarak sekitar 9 km kearah utara dari ibukota Kabupaten Wajo, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Maniangpajo

Sebelah Timur : Kecamatan Majauleng

Sebelah Selatan : Kecamatan Tempe

Sebelah Barat : Kecamatan Belawa

Kecamatan Tanasitolo mempunyai luas daerah wilayah 154,60 km dengan jumlah penduduk 38,350 jiwa. Yang tersebar diantara 15 desa dan 4 kelurahan (40 dusun/lingkungan) dengan berbagai mata pencarian. Yang siap membantu PAD. Berdasarkan peta eksplorasi Sulawesi Selatan jenis tanah yang ada dikecamatan Tanasitolo yaitu tanah Pedsolik. Tanasitolo merupakan salah satu Kecamatan yang dijuluki sebagai Kecamatan pusat industri dengan produsen sutera terbesar di Sulawesi Selatan. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa dan 4 kelurahan dengan jumlah penduduk 38.00 jiwa atau 3177 kk.

b. Visi

Visi Kecamatan Tanasitolo yaitu unggul dalam pelayanan hak dasar dan pembaharuan kecamatan.

c. Misi

Misi Kecamatan Tanasitolo yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prima

- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- 4) Meningkatkan kerjasama masyarakat dan pemerintah
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tanasitolo

Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah baik provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari perilaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam pola organisasi.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Dibawah sekretaris Camat terdapat tiga kepala sub bagian yaitu :

1. Kasubbag keuangan

2. Kasubbag umum dan kepegawaian
3. Kasubbag perenanaan dan pelaporan

Dibawah naungan Camat Tanasitolo terdiri dari lima kepala seksi yaitu :

1. Kepala seksi tata pemerintahan
2. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat
3. Kepala seksi kesejahteraan sosial
4. Kepala seksi ekonomi dan pembangunan
5. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban
4. Visi misi Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo

a. Visi

Terwujudnya peningkatan industri kecil dan menengah yang berdaya saing dan mampu menjadi pilar penggerak utama ekonomi kerakyatan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan sarana/prasarana pendukung peningkatan industri
3. Mengembangkan industri berbasis unggulan daerah
4. Meningkatkan daya saing industri

5. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah dalam urusan Koperasi, UMKM.

Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Koperasi, UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UMKM berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Koperasi, UMKM;
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang Koperasi, UMKM lingkup Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan Koperasi, UMKM;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, UMKM lingkup Kabupaten/Kota.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Penerapan Peraturan
 - b. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Pengaturan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penfembangan Koperasi
 - a. Kepala Seksi Fasilitas usaha Koperasi
 - b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
 - a. Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro
 - b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
 - c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

b. Visi

Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan Koperasi, UMKM telah visi misi dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Perindustrian RI, serta isu-isu strategis pemberdayaan Koperasi, UMKM di Kabupaten Wajo, maka visi Koperasi,UMKM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 adalah :

“Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Tangguh, Mandiri, Berdaya saing serta berbasis ekonomi kerakyatan dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Visi diatas diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta stakeholder terkait. Makna yang terkandung dari visi diatas adalah :

1. Terwujudnya

Terwujudnya adalah adanya hasil kinerja baik dari segi perekonomian masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan kongkrit yang menunjukkan peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.

2. Koperasi dan UMKM

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.

UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

3. Tangguh

Tangguh artinya kondisi Koperasi, UMKM yang tangguh dengan memiliki manajemen yang sehat dan kuat sehingga mampu menghadapi tantangan dalam setiap perubahan ekonomi, tantangan ke depan, bagaimana

pengurus, pengawas dan pengelola koperasi, UMKM mampu menyusun rencana detail tindak lanjut kegiatan untuk penguatan kelembagaan serta memastikan bahwa pengurus, pengawas dan pengelola konsisten menjalankan rencana usaha yang sudah ada melalui pengembangan agribisnis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Mandiri

Mandiri adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan memakmurkan anggotanya dan berkontribusi terhadap kemajuan berbangsa dan bernegara.

5. Berdaya Saing

Berdaya saing artinya kondisi koperasi, UMKM yang mampu berkompetisi dengan pelaku koperasi UMKM yang lain secara sehat.

6. Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Berbasis ekonomi kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat.

7. Menjadi Penggerak Utama Ekonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan rakyat

Dengan mendirikan Koperasi, UMKM diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya dan menjadi salah satu mesin bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sekaligus alat ampuh untuk lebih pemeratakan

pembangunan yang sejalan dengan program pengentasan kemiskinan karena pelayanan yang diberikan koperasi sangatlah banyak dan ikut membantu mensejahterakan masyarakat serta para anggotanya. Jadi koperasi sangatlah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat dan anggotanya serta berperan besar untuk perubahan ekonomi pada masyarakat.

c. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabatan dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh di masa mendatang.

Sebagaimana upaya mewujudkan Visi diatas maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Koperasi, UMKM, misi Dinas koperasi, UMKM Kabupaten Wajo adalah 2014-2019:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM

Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk mewujudkan aparatur Pembinaan Koperasi UMKM dan profesional serta peningkatan kualitas perencanaan pemberdayaan Koperasi UMKM.

2. Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Misi ini diarahkan pada peningkatan kemampuan Koperasi UMKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

3. Meningkatkan kelembagaan Koperasi UMKM

Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM serta meningkatkan citra koperasi.

4. Mendorong pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Misi ini diarahkan pada tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi dimasa depan.

B. Karakteristik Informan

Berikut adalah karakteristik secara umum menurut jenis Kelamin, Umur, Pendidikan dan Pekerjaan.

1. Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada di bawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	2	22,22 %
Perempuan	4	44,44 %
Jumlah	6	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juni 2017

Distributor informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 2 orang berjenis laki-laki atau sebesar 22,22 persen dan 4 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 44,44 persen dari keseluruhan informan yang ada.

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Penelitian ini menggunakan karakteristik informan berdasarkan umur. Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut umur ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Keterangan	Frekuensi	Persentase
34-37	3	33,33 %
40-48	2	22,22 %
50 tahun ke atas	1	11,11 %
Jumlah	6	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juni 2017

Distributor informan berdasarkan umur menerangkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur yang berkisar 34-37 tahun yang menunjukkan sebanyak 3 orang informan atau 33,33 % persen dari jumlah informan. Informan yang berumur 40-48 sebanyak 2 orang atau 22,22 % serta informan yang berusia 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang atau 11,11 persen dari jumlah informan yang ada.

3. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik informan yang menjadi subyek penelitian menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
S2	1	11,11%
S1	2	22,22%
SMA	1	11,11%
SMP	2	22,22
Jumlah	6	100 %

Sumber : diolah dari data primer, Juni 2017

Distributor informan berdasarkan tingkat pendidikannya menerangkan bahwa 1 orang berpendidikan S2 atau sebanyak 11,11 persen, 2 orang berpendidikan S1 atau sebanyak 22,22 persen dan jumlah tingkat pendidikan informan yang berpendidikan SMA 1 atau 11,11 dan jumlah tingkat pendidikan informan yang berpendidikan SMP 2 orang atau sebanyak 22,22 persen dari jumlah yang ada.

4. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut pekerjaan yang dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Frekuensi	Persentase
PNS	3	33,33%
Non PNS	3	33,33%
Jumlah	6	100%

Sumber : diolah dari data primer, Juni 2017

Distributor informan tentang pekerjaannya berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 3 orang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau 3,33 persen, 3 orang yang non pegawai negeri sipil 33,33 persen dari informan yang ada.

5. Data Usaha Jumlah Tenun Tradisional

Table 6. Akumulasi data industri kecil menengah (IKM) 2016-2017

No.	Tahun	Jumlah masyarakat penenun	Dana (Rp)
1.	2016	20 Orang	35.500.000
2.	2017	35 Orang	47.000.000

Akumulasi data usaha tenun dari Tahun 2016-2017 adanya peningkatan dari jumlah masyarakat penenun yaitu 35 orang yang dilayani di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sehingga penyuluh yang ada di UPT sedikit terkendala dalam memberikan pelatihan dan pembinaan dan adanya peningkatan dana yang dikeluarkan atas kerjasama antara BUMN dan Dinas Koperasi Rp.14.000.000 untuk pembelian perlengkapan tenun seperti benang, kain dan perlengkapan lainnya sesuai yang dibutuhkan masyarakat penenun tersebut.

C. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat penenun tradisional telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo. Dengan ini peneliti akan menjelaskan indikator-indikator yang terdapat di dalam pemberdayaan penenun tradisional yang meliputi (a) Koordinator (b) Fasilitator (c) Stimulator. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu Faktor Internal yakni (a) kelembagaan dan SDM (b) pemasaran dan teknologi (c) modal intelektual, Faktor Eksternal yakni (a) infrastruktur.

1. Koordinator

Pemerintah daerah sebagai koordinator dalam usaha mengatur dan menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah

ditentukan. Untuk menghasilkan produksi yang baik maka diperlukan sebuah koordinasi antara pemerintah daerah.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari segi koordinator yaitu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan penyuluh yang diberikan wewenang dalam memberikan pelatihan dalam mengkreasikan motif sesuai dengan keinginan masyarakat penenun di UPT (Unit Pelayanan Terpadu).

a. Memberikan pelatihan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional dalam memberikan pelatihan mengkreasikan motif kepada masyarakat penenun dimana instansi yang terlibat dalam pelayanan ini adalah Dinas Perindustrian agar usaha masyarakat berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak. Hal ini ditegaskan oleh SY selaku Kepala Dinas Perindustrian Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang menjelaskan bahwa:

“Kami memberikan wewenang kepada penyuluh yang ada di UPT untuk membina guna masyarakat terampil dalam mengkreasikan motif tenun dengan tujuan agar masyarakat dapat terbantu dalam meningkatkan usahanya.” (wawancara 10 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Perindustrian memberikan wewenang kepada penyuluh yang ada di UPT untuk membina guna terampil dalam mengkreasikan motif sehingga masyarakat penenun sudah terbantu sedikit demi sedikit dalam meningkatkan usahanya karena sudah adanya pelatihan atau pembinaan dari UPT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR selaku kepala Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan produk yang berkualitas maka saya selaku kepala Dinas Koperasi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian yang memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi tempat masyarakat menenun dan memotifasi serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas sesuai keinginan konsumen dengan jumlah harga yang telah ditentukan.” (wawancara dengan AR 06 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis memahami bahwa Pemerintah Daerah yakni kepala Dinas Koperasi sudah bertanggung jawab dalam memfasilitasi masyarakat penenun serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan menentukan jumlah harga sesuai dengan kesepakatan antar kepala Dinas Koperasi dengan masyarakat penenun bahwa:

Selanjutnya wawancara dari pihak RA selaku penyuluh UPT (Unit Pelayanan Terpadu) :

“Setiap melakukan pembinaan dan pelatihan mengkreasikan motif tenun kami merasa sangat kewalahan dikarenakan jumlah masyarakat penenun dari Tahun 2016-2017 memiliki peningkatan yaitu 35 orang sehingga pelatihan yang kita lakukan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat penenun karena dilihat dari jumlah masyarakat yang dilayani (35 orang).(wawancara RA 06 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa penyuluh yang ada di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sangat terbatas waktunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penenun karena dilihat dari jumlah masyarakat yang dilayani dalam sehari sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam mengkreasikan motif sehingga penyuluh sangat kewalahan dan masyarakat tidak puas dengan pembinaan dan pelatihan yang ada di UPT tersebut.

Selanjutnya wawancara NM dengan selaku masyarakat penenun tardisional yang menyatakan bahwa:

“Penyediaan jumlah waktu yang terbatas membuat usaha kami tidak berjalan efektif sehingga masyarakat penenun kurang mendapatkan pelatihan serta pengembangan menenun. Oleh karena itu tindakan penenun dengan pegawai yang ada di dalam UPT (Unit Pelayanan Terpadu) tidak seragam”. (wawancara dengan NM 09 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat mengerti bahwa waktu yang dimiliki oleh masyarakat penenun sangat terbatas dalam pelatihan serta pengembangan menenun dalam mengkreasikan motif dari UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sehingga usaha masyarakat tidak berjalan sesuai dengan harapan para masyarakat penenun serta konsumen.

Lanjut wawancara dengan IT selaku masyarakat penenun menyatakan bahwa:

“Dalam usaha kami sebagai masyarakat penenun masih kurangnya pelatihan dikarenakan penyediaan waktu yang tidak tepat dalam melakukan pekerjaannya karena banyaknya masyarakat yang dilayani yaitu 35 orang penenun sehingga usahanya tidak berjalan sesuai yang telah ditentukan”(wawancara dengan IT 09 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat mengerti bahwa waktu yang disediakan oleh UPT (Unit Pelayanan Terpadu) masih terbatas dalam pelatihan maka usaha masyarakat penenun tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga pesanan para konsumen tidak memuaskan karena tidak adanya kerjasama antara masyarakat penenun dengan orang yang bekerja di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) tersebut.

Masyarakat penenun di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yaitu sebanyak 420 orang terbagi dari 12 kelompok dan masing-masing setiap

kelompok berjumlah 35 orang. Dengan adanya pembagian kelompok tersebut akan memudahkan Dinas Perindustrian dalam melakukan pelatihan dan pembinaan dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Dengan pelatihan ini selaku dari pihak Dinas Koperasi dan BUMN saling berkontribusi dalam memberikan anggaran dana terkait pembiayaan alat tenun modern dengan harga Rp. 63.000.000 per 7 mesin tenun, setiap mesin tenun seharga Rp.9.000.000 yang terbagi dalam 12 kelompok tenaga kerja.

Peran Pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam hal ini jika dilihat dari segi indikator koordinator belum maksimal dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat (35 orang) yang dilayani di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sehingga penyuluh masih sangat terbatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penenun sehingga penyuluh merasa kewalahan dalam memberikan pelatihan mengkreasikan motif dan mengakibatkan usaha masyarakat penenun tidak efektif.

Peran Pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam hal ini bisa dikatakan efektif dan efisien apabila pelayanan di UPT mampu melayani seluruh masyarakat yang terlibat dalam memberikan pelatihan mengkreasikan motif sesuai dengan kebutuhan para penenun dengan tujuan agar usaha tenun bisa efektif, efisien dan dapat bersaing di pasar local maupun internasional.

Bentuk –bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi koordinator pemerintah (Dinas Perindustrian) memberikan wewenang kepada penyuluh yang ada di UPT untuk

memberikan pelatihan kepada masyarakat penenun agar usaha masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan usahanya semakin meningkat dari sebelumnya.

2. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan tradisional (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya dan pengaturan penetapan tata ruang daerah yang lebih baik.

Peran Pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam hal ini jika dilihat dari segi indikator fasilitator dinilai berhasil dan efektif dikarenakan adanya kerjasama antara Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi serta perbankan BUMN dalam memberikan bantuan berupa fasilitas UPT dengan tujuan agar memudahkan masyarakat penenun dalam menghasilkan hasil tenunan yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing di pasar lokal dan internasional.

a. UPT (Unit Pelayanan Terpadu)

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah tempat pemberian pelayanan dalam melakukan suatu pelatihan kepada masyarakat penenun dalam mengkreasikan motif. Selain sebagai tempat pelayanan dalam melakukan pelatihan dan pembinaan, UPT juga berfungsi sebagai tempat promosi hasil produksi masyarakat dengan sistem uji kelayakan kualitas produk sebelum di pasarkan. Hal ini juga ditegaskan oleh SY selaku Kepala Dinas perindustriusian Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang menjelaskan bahwa:

“Dengan cara pemerintah Kabupaten Wajo mendirikan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sebagai wadah atau tempat bagi pengusaha untuk mengkreasikan motif dan meningkatkan kualitas produksi tenun, bentuk kerjasama perindustrian yaitu membina sumber daya manusia guna bisa terampil, pandai dan mempunyai kemampuan membuka lapangan kerja sendiri dengan adanya pembinaan maka terbentuklah industri-industri rumahan yang biasa disebut IKM (Industri Kecil dan Menengah) agar IKM ini dapat berkembang”.(wawancara dengan SY 11 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat mengerti bahwa pemerintah Kabupaten Wajo mendirikan sebuah tempat yang disebut sebagai UPT (Unit Pelayanan Terpadu) untuk tempat mengkreasikan motif dan untuk meningkatkan kualitas produksi tenun. Pemerintah Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dalam bentuk dana yakni memberikan dana kepada masyarakat penenun untuk menyiapkan kain yang dibawa ke UPT tersebut. Di dalam UPT masyarakat penenun di bimbing dalam berkreasi sesuai dengan pesanan dari konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR selaku kepala Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa:

“Dengan melakukan Pembinaan dan Monitoring secara berkala kepada para penenun agar fasilitas yang telah diberikan digunakan tepat sasaran.(wawancara dengan AR 11 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa Dinas Perindustrian mengadakan pembinaan kepada masyarakat penenun agar penenun dapat mengetahui tentang cara memproduksi kain tenun yang berkualitas serta memonitoring seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para penenun. Kegiatan monitoring dilaksanakan di pusat khusus penenun di Kecamatan Tanasitolu Kabupaten Wajo sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menghasilkan

produksi kain tenun sutera yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan para konsumen atau pelanggan.

Lanjut wawancara dengan AR selaku kepala Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa:

“Dari pembinaan dan pelatihan di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) oleh penyuluh yang telah diberikan kepercayaan oleh Dinas Perindustrian untuk melayani masyarakat penenun 35 orang, kemudian kami dari Dinas Koperasi menghimpun semua pelaku-pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) untuk memberikan bantuan dana agar IKM dapat bekerja secara berkesinambungan dan berkembang secara terus menerus”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dimana Dinas Perindustrian memberikan wewenang kepada penyuluh yang ada di UPT untuk melayani masyarakat penenun dan Dinas Koperasi yang menghimpun semua pelaku-pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) dan Dinas Koperasi memberikan dana kepada penyuluh yang ada di UPT tersebut untuk membeli semua perlengkapan atau kebutuhan masyarakat penenun agar usaha semakin meningkat sesuai dengan harapan semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NM selaku masyarakat penenun yang menyatakan bahwa :

“Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa alat tenun yang lebih berkualitas lagi dari sebelumnya sehingga produk yang dihasilkan lebih bagus dan masih banyaknya bantuan dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penenun seperti halnya alat mesin serta benang yang digunakan dalam menenun. (wawancara dengan SF 13 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa fasilitas yang telah disediakan sudah membantu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam menenun sehingga produk yang dihasilkan masyarakat sudah

tidak diragukan lagi oleh para konsumen karena sudah adanya fasilitas yang disediakan sehingga usaha masyarakat berjalan lancar dan sesuai keinginan para konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IT selaku masyarakat penenun yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya bantuan berupa fasilitas alat tenun dari Pemerintah Daerah Dinas perindustrian dan Dinas Koperasi itu akan mempermudah kami sebagai masyarakat penenun sutera sehingga hasil tenun kami semakin berkualitas dan meningkat .

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian bantuan berupa fasilitas seperti alat tenun yang berkualitas dari pemerintah daerah karena adanya kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi mempermudah masyarakat penenun dalam meningkatkan hasil tenun dan menghasilkan hasil tenun yang berkualitas tinggi. (wawancara dengan IT 13 Juni 2017).

Bentuk –bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi fasilitator Dinas Perindustrian mendirikan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) serta dana dari Dinas Koperasi dimana tempat masyarakat penenun mendapatkan pelatihan serta pembinaan dalam mengkreasikan motif sesuai kebutuhan atau pesanan para pelanggan.



UPT (Unit Pelayanan Terpadu)

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah tempat pemberian pelayanan dalam melakukan suatu pelatihan atau pembinaan kepada masyarakat penunun dalam mengkreasikan motif. Selain sebagai tempat pelayanan dalam melakukan pelatihan dan pembinaan, UPT juga berfungsi sebagai tempat promosi hasil produksi masyarakat dengan sistem uji kelayakan kualitas produk sebelum di pasarkan.

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Penunun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari segi indikator fasilitator, adanya kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dalam menyiapkan fasilitas (tempat kerja masyarakat penunun mendapatkan pelatihan dalam mengkreasikan motif) yang dinamakan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) yang sudah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Wajo dan di UPT ini pusat promosi, ruang pamer sentra IKM (Industri Kecil Menengah) serta adanya ruang laboratorium uji kelayakan kualitas produk masyarakat penunun.

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor yang telah ada di daerahnya seperti pembuatan brosur-brosur pembangunan kawasan industri, pembuatan tempat-tempat usaha untuk produk-produk usaha dan koperasi, dan membantu usaha dan koperasi untuk melakukan pameran.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional dari segi stimulator dalam pembuatan brosur untuk memasarkan hasil produksi mereka di pasar lokal maupun internasional serta diadakannya pameran agar produknya bisa dikenal keluar daerah yang dimana instansi yang terlibat di dalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi. Hal ini ditegaskan oleh SY selaku Dinas Perindustrian Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo bahwa:

a. Pembuatan brosur serta tempat pameran

Pembuatan brosur dan penyediaan tempat pameran untuk masyarakat penenun dengan tujuan agar produk yang dihasilkan oleh masyarakat penenun bisa dikenal dimasyarakat luas, produknya bisa bersaing dipasaran baik lokal maupun internasional serta memperkenalkan produk asli buatan masyarakat melalui brosur dan pameran tersebut yang diselenggarakan oleh instansi yang terkait di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi serta bekerja sama dengan pihak Bappeda kabupaten Wajo. Hal ini ditegaskan oleh SY selaku kepala Dinas Perindustrian Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo bahwa:

“Agar produk yang dihasilkan itu menyebar keseluruh daerah maka di sediakannya brosur-brosur serta menyediakan tempat atau wadah bagi

masyarakat penenun agar produk yang dihasilkan itu lebih berkembang dan diadakannya program perencanaan pengembangan pemetaan wilayah industri di Kabupaten Wajo yang di singkat RIPIK (Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten) yang dikerjasamakan dengan pihak Bapeda Kabupaten Wajo.(wawancara dengan SY 14 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa pemerintah Kabupaten Wajo berupaya meningkatkan dan mengembangkan usaha para penenun dengan cara membagi bagi brosur, pembuatan tempat-tempat serta mengadakan pameran agar produksi dapat diketahui oleh semua orang baik dalam daerah itu sendiri pelosok-pelosok dalam negeri maupun luar negeri oleh karena itu untuk mencapai rencana tersebut maka pemerintah Kabupaten Wajo menjalin kerja sama dengan pihak Bapeda Kabupaten Wajo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa :

“Memberikan bantuan kepada masyarakat penenun dalam hal mempromosikan hasil produknya dengan cara membuat brosur-brosur serta tempat pameran agar produknya itu bisa lebih berkembang ke luar daerah dengan cara memberikan jaminan keamanan investasi serta promosi produk unggulan daerah.(wawancara dengan AR 14 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa karena adanya bantuan dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dalam pembuatan brosur-brosur dan tempat yang sudah disediakan serta diadakannya pameran maka masyarakat penenun sudah tidak sulit lagi mempromosikan hasil produknya ke pelosok-pelosok.

Hasil wawancara dengan RA selaku penyuluh di UPT mengatakan bahwa:

“Kami ikut bekerjasama dalam pembuatan brosur-brosur serta tempat pameran agar usaha masyarakat penenun bisa berjalan dengan lancar dan karya-karya mereka bisa dikenal dikalangan masyarakat luar daerah dengan cara brosur dibagikan dan diadakannya pameran”(wawancara dengan RA 14 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengerti bahwa penyuluh yang ada di UPT ikut bekerjasama dengan pihak lainnya dalam hal pembuatan brosur dan tempat pameran demi usaha masyarakat penenun agar usaha tersebut bisa semakin dikenal dan meningkat dari sebelumnya dan karya-karya mereka bisa dikenal diluar daerah.

Selanjutnya wawancara dengan AL selaku masyarakat penenun menyatakan bahwa:

“Dalam menciptakan dan mengembangkan usaha maka pemerintah daerah mengupayakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak Bappeda Kabupaten Wajo dengan cara membuat brosur-brosur tempat serta pameran agar masyarakat dari dalam maupun dari luar dapat mengetahui. Sehingga kami sebagai penenun dapat memproduksi kain tenun sebanyak-banyaknya sehingga upah kami juga turut bertambah (wawancara dengan AL 19 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dengan melakukan kerjasama dengan pihak Bappeda Kabupaten Wajo dalam mengembangkan usaha kain tenun telah berdampak positif bagi perekonomian didaerah maupun pada masyarakat penenun itu sendiri dan dapat mempromosikan produk ditingkat nasional terutama kain tenun.

Senada dengan itu, masyarakat penenun yang berinisial IT mengatakan bahwa:

“Dengan beredarnya brosur-brosur di semua kalangan masyarakat atau dengan kata lain mempromosikan hasil keterampilan para penenun memberikan dampak yang baik bagi para penenun karena memberikan kami kemudahan dalam memperkenalkan hasil tenunan yang kami produksi dan dengan adanya bantuan dari pemerintah membantu pekerjaan kami sehingga usaha semakin meningkat” (wawancara dengan IT 19 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa para penenun sangat terbantu dengan adanya brosur yang beredar karena memberikan dampak yang baik bagi para penenun sebab dengan adanya brosur yang telah di buat dan dibagikan kesemua kalangan masyarakat sehingga membantu para penenun dalam mempromosikan hasil tenunan mereka.

Peran Pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam hal ini jika dilihat dari segi indikator stimulator dinilai berhasil dan efektif dikarenakan peran aktif Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, penyuluh yang ada di UPT serta masyarakat penneun dalam melakukan suatu pengembangan usaha melalui tindakan khusus seperti pembuatan brosur-brosur, ini bertujuan agar produk yang dihasilkan itu menyebar keseluruh daerah dan dapat mempengaruhi investor yang ada didaerah tersebut serta tempat pameran agar produknya itu bisa lebih berkembang ke luar daerah dengan cara memberikan jaminan keamanan investasi serta promosi produk unggulan daerah.

Bentuk –bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi stimulator sangat berperan karena adanya kerjasama antara semua pihak yakni Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, penyuluh yang ada di UPT serta masyarakat penenun dalam pembuatan brosur-

brosur agar karya masyarakat bisa dikenal diluar daerah dan adanya tempat pameran yang disediakan sehingga usaha masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya.



Brosur Hasil Kain Tenun

Brosur hasil tenun masyarakat ini dibuat dengan tujuan sebagai penarik minat wisatawan asing dan juga masyarakat indonesia agar produk tenun hasil buatan masyarakat lokal bisa juga bersaing di pasaran seperti tenun yang terkenal seperti sekarang ini. Kemudian dengan adanya brosur hasil tenun bisa memudahkan dalam memperkenalkan produk.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari segi indikator stimulator dimana dalam

pembuatan brosur ini dibantu oleh Dinas dan penyuluh yang ada di UPT sehingga karya masyarakat penenun bisa di promosikan melalui brosur-brosur yang ada sesuai dengan hasil karya masyarakat penenun.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan penenun di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo:

1. Faktor Internal

a. Kelembagaan dan SDM

Upaya membangun UMKM tidak lepas dari masalah kelembagaan dan SDM. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha menjadi tonggak utama dan memajukan UMKM. Masalah SDM tentu berimplikasi pada mutu kelembagaan UMKM. Kecilnya akses produk barang dan jasa ke pasar ekspor tidak lepas dari masalah kelembagaan. Berdasarkan pandangan ekonomi kelembagaan, kesehatan kelembagaan UMKM idealnya memiliki ciri-ciri berpegang pada aturan main, memiliki asa legalitas yang kuat, baik lembaga maupun kegiatannya, memiliki kemampuan mambiyai operasional usaha sesuai dengan skalanya dan memiliki jaringan ke dahulu dan hilir sama baiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Dinas Koperasi menyatakan bahwa :

“Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung eksistensi kapasitas pelaku usaha agar pengaruh dari luar dapat diantisipasi dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui Diklat, Workshop dan sosialisasi secara kontinyu untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan termasuk pemagangan keluar daerah serta memotivasi dan membina untuk meningkatkan mutu produk yang kompetitif”.(wawancara dari AR 20 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa regulasi atau kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah daerah untuk masyarakat

penenun sehingga menjamin pengaruh dari luar dapat diantisipasi sehingga apabila diadakannya Diklat, Workshop serta Sosialisasi berjalan sesuai harapan untuk meningkatkan pengetahuan dalam keterampilan serta pemagangan keluar daerah dan memotivasi masyarakat dalam memasarkan produknya sehingga masyarakat penenun lebih berkembang dalam pemasaran produk.

Begitupun dengan tanggapan dari SY selaku Kepala Dinas Perindustrian yang menyatakan bahwa:

“Dengan dibentuknya kelembagaan sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pertenunan yang diatur dalam peraturan Bupati sebagai syarat pendirian UPT (Unit Pelayanan Terpadu) pertenunan sehingga pengusaha sutera dapat terorganisir dan di dalam UPT tersebut dibuat ruang laboratorium untuk pengujian kualitas produksi dengan bukti sertifikasi uji kelayakan untuk meyakinkan konsumen akan kualitas barang yang dihasilkan.(wawancara dengan AR 20 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat memahami bahwa dengan dibentuknya kelembagaan sentra IKM (Industri Kecil Menengah) pertenunan yang diatur dalam peraturan Bupati sehingga masyarakat penenun atau pengusaha sutera dapat terorganisir dan adanya ruang laboratorium yang disediakan untuk menguji hasil produk masyarakat itu terbukti kualitasnya sehingga para konsumen tidak ragu-ragu lagi dalam pembelian.

Lebih lanjut wawancara dengan IT selaku masyarakat penenun menyatakan bahwa :

“Selama adanya Diklat dan Workshop serta pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi produk yang kami hasilkan lebih berkualitas dari sebelumnya serta adanya motivasi dan pemahaman mengenai Diklat dan Workshop sehingga meningkatkan produk yang lebih kompetitif (wawancara dengan 20 Juni 2017).

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa diadakannya Diklat, Workshop serta Sosialisasi sehingga meningkatkan kapasitas usaha masyarakat penenun dan adanya pengetahuan mengenai pemagangan diluar daerah dan pembinaan serta memberikan motivasi masyarakat penenun untuk meningkatkan mutu produk yang kompetitif.

Lebih lanjut lagi wawancara dengan NM selaku masyarakat penenun menyatakan bahwa:

“Regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat mengenai pelatihan dan pembinaan bagi para penenun membuat kami para penenun terbantu kerana dengan keterampilan yang telah diberikan oleh Dinas perindustrian dan bantuan dana dari Dinas Koperasi memberikan kami semangat agar menghasilkan keterampilan atau karya yang mampu bersaing dengan pasar global apalagi dengan adanya MEA (masyarakat ekonomi asean) sekarang” (wawancara NM 20 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dengan adanya pelatihan dan pembinaan dalam regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat membantu para penenun sebab dengan keterampilan yang dimiliki lewat pelatihan dan pembinaan pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi memberikan semangat juang bagi para penenun agar lebih terampil dalam mengelola hasil bumi yang mereka miliki dan mampu bersaing dengan pasar global.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sudah terealisasi dengan baik karena adanya kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi mengenai Workshop, Diklat dan Sosialisasi dalam meningkatkan kapasitas usaha masyarakat penenun

dan peningkatan mutu produk yang kompetitif sehingga produk yang masyarakat hasilkan lebih berkualitas dari sebelumnya.

Bentuk–bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi kelembagaan dan SDM peran pemerintah melalui Workshop, Diklat dan Sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi untuk meningkatkan keterampilan dan mutu produk masyarakat penenun dan adanya laboratorium yang disediakan di UPT untuk menguji kelayakan agar produk yang dihasilkan meyakinkan konsumen akan kualitas barang atau karya masyarakat penenun.

b. Pemasaran dan Teknologi

Tuntutan untuk mengikuti standar, desain dan kualitas produk agar sesuai ketentuan, menuntut perubahan dalam kegiatan produksi dan pemasaran. UMKM sering terhambat masalah karena disebabkan antara lain produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sulit distandarisasi, pemahaman dan penguasaan teknis implementasi standar dalam produksi, penguasaan teknologi dalam produksi terbatas, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tidak mendorong UMKM untuk melaksanakan diri dan konsumen lokal cenderung masih belum kritis tentang standarisasi mutu. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian yang menyatakan bahwa:

“Adanya UPT (Unit Pelayanan Terpadu) yang disediakan sehingga masyarakat penenun dituntut untuk mengelola dengan baik agar desain dan kualitas produk sesuai dengan ketentuan atau standar mutu yang memiliki standar pemasaran dan mampu bersaing dengan pasar global” (wawancara dengan SY 21 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya kerjasama Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi serta masyarakat penenun untuk mengelola hasil produksi dengan baik agar desain dan kualitas produk sesuai ketentuan atau standar mutu yang memiliki dan standar pemasaran yang mampu bersaing dengan pasar global serta pemahaman dan penguasaan teknologi sangat diperlukan dalam mempromosikan produksi tenun masyarakat penenun.

Lanjut dari itu, Bidang Pembinaan Industri Kecil dan Menengah mengatakan bahwa:

“Masyarakat penenun diberikan pelatihan dan pembelajaran untuk menghasilkan standar mutu pemasaran dan penguasaan teknologi sehingga usaha masyarakat berkualitas dan mampu bersaing dengan pasar global ” (wawancara dengan IN 21 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian memberikan pelatihan dan pembelajaran agar menghasilkan standar mutu pemasaran yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pasar global dengan adanya penguasaan teknologi agar usaha tenun masyarakat dapat dipasarkan melalui media sosial.

Selanjutnya wawancara dengan RA selaku penyuluh di UPT yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai penyuluh yang diberikan wewenang dari Dinas Perindustrian untuk memberikan pembinaan dan pelatihan mengenai pemakaian teknologi (mesin tenun) dalam mengerjakan kebutuhan masing-masing masyarakat masih belum tercapai dikarenakan sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam pelatihan tersebut kurang memahami cara pemakaian teknologi tersebut sehingga pelatihan yang kami berikan belum maksimal karena dilihat dari banyaknya masyarakat penenun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terkendalanya penyuluh dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat penenun dalam pembinaan teknologi yang berupa alat mesin tenun sehingga usaha masyarakat tidak berjalan sesuai dengan keinginan karena dalam pelatihan dan pembinaan tersebut masyarakat tidak merasa puas karena banyaknya masyarakat yang dilayani.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan masyarakat penenun yang berinisial NM mengatakan bahwa:

“Kami para penenun masih terbatas jika membahas mengenai pemasaran dan teknologi sebab kami masih menggunakan produk seni dan manual karena alat yang kami miliki masih tradisional dan masih perlu dikembangkan lagi agar kami dapat memproduksi lebih banyak hasil tenun sesuai dengan pesanan para pelanggan.” (wawancara dengan NM 22 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat penenun mengharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan mereka dan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan demi untuk kelancaran dalam produksi dan mampu menghasilkan tenunan yang berkualitas dan memberikan keuntungan bagi masyarakat penenun di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

Selanjutnya pula dilakukan wawancara dengan masyarakat penenun yang berinisial AL mengatakan bahwa:

“Karena keterbatasan teknologi membuat kami para penenun kewalahan dalam memproduksi dan menghasilkan produksi yang berkualitas sebab alat teknologi yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi masih terbatas sehingga kami selaku masyarakat penenun belum memahami cara pemakaian alat tersebut karena masih kurangnya pelatihan dari UPT (Unit Pelayanan Terpadu) wawancara dengan IT 22 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa karena keterbatasan masyarakat penenun dalam menggunakan alat yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi masih terbatas dalam memberikan pelatihan karena masih kurangnya pemahaman mengenai pemakaian teknologi serta mereka tidak memiliki kemampuan khusus dalam mempromosikan hasil karya mereka sehingga produksi yang mereka hasilkan tidak dapat bersaing dengan pasar dunia dan tidak memiliki standar mutu yang berkualitas.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari segi indikator pemasaran dan teknologi belum tercapai karena penyuluh yang ada di UPT terkendala dalam pelayanan kepada masyarakat penenun karena banyaknya masyarakat yang dilayani dan sebagian besar masyarakat kurang mengetahui cara pemakaian mesin teknologi sehingga usahanya tidak berjalan dengan lancar dan pemasaran pun ikut terkendala karena kurangnya produk yang bisa dipasarkan.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam hal ini bisa dikatakan efektif dan efisien apabila penyuluh yang ada di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) bisa mengontrol dan mengatur waktunya sehingga masyarakat penenun yang terlibat di dalam pelatihan dan pembinaan tersebut bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan mengenai cara penggunaan teknologi alat mesin tenun sehingga produk yang dihasilkan masyarakat bisa dipasarkan dipasar lokal maupun internasional.

Bentuk –bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi pemasaran dan teknologi adanya UPT

(Unit Pelayanan Terpadu) yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi tempat masyarakat penenun diberikan pelatihan dan pembinaan agar menghasilkan standar mutu pemasaran dan teknologi alat mesin tenun mengenai mengkreasikan motif sehingga menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan mampu bersaing ke pasar global.

c. Modal Intelektual

Pada abad XXI ini muncul *information society* dan *knowledge base society* yang menempatkan “powerfull” dibandingkan kapital dan sumber daya alam. Peran informasi sebagai input sekaligus output dari iptek menjadi penting dalam era *knowledge-based economy*. Penguasaan teknologi informasi merupakan bentuk modal intelektual masih sangat terbatas dimanfaatkan oleh UMKM. sistem yang berbasis pada jaringan (network) menjadi komponen dalam menentukan kesuksesan bisnis di era globalisasi, namun faktanya masih terbatas dimanfaatkan dan masih lemah dikuasai oleh para pengusaha. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pengetahuan atau penguasaan teknologi memberikan kemudahan bagi para penenun untuk lebih kompeten dalam memproduksi dan berkarya untuk menjamin kelangsungan hidup para penenun dan dengan adanya pengetahuan membantu mereka untuk lebih terampil dalam memproduksi karya tenunan yang mereka buat” (wawancara dengan SY 23 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya bantuan dari Dinas Perindustrian dan Dinas koperasi mengenai penguasaan teknologi sehingga masyarakat penenun sudah bisa memproduksi hasil karyanya sendiri dan produk yang dihasilkan itu dapat mensejahterakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat penenun.

Lanjut wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi AR yang menyatakan bahwa :

“Adanya penguasaan teknologi informasi untuk membantu para masyarakat penenun dalam kemudahan memproduksi hasil tenun maka kami selaku Dinas Koperasi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian untuk membantu jalannya usaha masyarakat agar produk yang dihasilkan itu lebih terampil serta dalam menentukan kesuksesan bisnisnya”(wawancara dengan AR 23 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis memahami bahwa adanya bantuan dari Dinas Koperasi yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian mengenai penguasaan teknologi informasi sehingga masyarakat penenun sudah bisa memproduksi atau menghasilkan tenun yang lebih bagus lagi dan dapat memasarkan hasil produksinya melalui media sosial agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Lanjut wawancara selaku masyarakat penenun NM yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya teknologi atau pengetahuan yang kami miliki lewat pelatihan dan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah kami sangat terbantu namun kami sedikit terkendala dalam memasarkan hasil produksi kami karena masih kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi informasi dalam memasarkan hasil produk kami ” (wawancara dengan NM 27 Juni 2017).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat penenun sangat terbantu dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi namun masyarakat masih kurang memahami cara menggunakan teknologi informasi dalam memasarkan hasil produksinya sehingga masih membutuhkan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi.

Lanjut wawancara AL selaku masyarakat penenun yang menyatakan bahwa:

“Keterampilan atau pengetahuan yang didapatkan masyarakat penenun dari pemerintah memberikan dampak yang baik, namun karena pihak yang diberikan kepercayaan untuk memberikan kami pelatihan tidak melaksanakan dengan baik sebab kami masih kurang memahami cara menggunakan teknologi informasi untuk memasarkan hasil produksi tenun” (wawancara dengan AL 27 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis memahami bahwa dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan dari pemerintah yang bersangkutan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan hasil produk tenunan mereka namun disisi lain pihak yang diberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya dengan baik tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga masyarakat masih terkendala dalam penggunaan teknologi untuk memasarkan hasil tenun mereka.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari segi indikator pemasaran dan teknologi belum tercapai karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat masih susah memasarkan sendiri hasil karyanya melalui sosial media.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dalam hal ini bisa dikatakan tercapai apabila penyuluh yang ada di UPT tersebut bisa mengkoordinir masyarakat penenun memberikan pembinaan dalam menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat penenun mendapatkan pembinaan sesuai keinginan sehingga karya-karya mereka bisa di pasarkan melalui social media.

Bentuk –bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi modal intelektual adanya bantuan dan kerjasama antara Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi serta penyuluh yang ada di UPT sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan usahanya sesuai kebutuhan masing-masing namun masih sedikit terkendala di penggunaan teknologi informasi dalam memasarkan hasil produk mereka.

6. Faktor Eksternal

a. Infrastruktur

Infrastruktur mempunyai pengaruh positif terhadap gerak laju UMKM karena sarana dan prasarana infrastruktur mempunyai peran strategis dalam proses produksi, distribusi ataupun pemasaran. infrastruktur sebagai bagian dari modal fisik tidak kalah penting dari modal lainnya. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan peningkatan infrastruktur adalah masalah pendanaan dan permasalahan hukum.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional dari segi infrastruktur bahwa adanya penyediaan alat tenun modern yang disediakan oleh instansi yang terkait diantaranya Dinas Koperasi dan BUMN dengan modal sebesar Rp.63.000.000 dengan 7 unit mesin tenun, setiap unit mesin tenun tersebut sebesar Rp.9.000.000 yang terbagi dengan 12 kelompok.

a. Mesin tenun modern

Dalam meningkatkan produktivitas tenun yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing dipasaran pemerintah menyediakan mesin tenun modern yang jauh

lebih praktis dan mudah sehingga usaha masyarakat penenun dapat berjalan dengan lancar dan menyelesaikan hasil tenun tepat waktu sesuai dengan pesanan para konsumen. Hal ini ditegaskan oleh AR selaku kepala Dinas Koperasi yang menyatakan bahwa:

“Untuk masalah pendanaan pemerintah memfasilitasi kepada lembaga keuangan/lembaga perbankan termasuk BUMN agar pelaku UMKM lebih mudah terakses pendanaan disamping itu melalui program-program dari pemerintah dan untuk mengantisipasi permasalahan hukum yaitu melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM agar program maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan, tataniaga dan regulasi yang ditetapkan agar proses produksi, distribusi dan pemasaran sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran”(wawancara dengan AR 26 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat mengerti bahwa masalah pendanaan pemerintahlah yang bertanggungjawab mengatasi serta memfasilitasi apa yang ingin dihasilkan oleh penenun baik kerjasama antar lembaga keuangan/lembaga perbankan termasuk BUMN agar pelaku UMKM lebih mudah terakses pendanaannya serta dengan melalui program-program pemerintah memberikan kemudahan bagi penenun untuk menghasilkan produksi yang bermutu.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Perindustrian mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan sarana dan prasarana dari lembaga keuangan/lembaga perbankan memberikan kami kemudahan dalam memberikan fasilitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan pelatihan sejenis keterampilan serta memberikan bantuan yang berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat penenun” (wawancara dengan SY 28 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan sarana dan prasarana memberikan kemudahan bagi masyarakat penenun

khususnya pemerintah karena dengan adanya bantuan tersebut memberikan motivasi yang sangat bermanfaat sebab masyarakat penenun mampu mengelola dengan baik karena mereka memiliki alat atau bahan yang bisa mereka kembangkan dan mereka asa agar menghasilkan standar yang bermutu.

Selanjutnya pula berdasarkan hasil wawancara AL selaku masyarakat penenun mengatakan bahwa:

“Kami terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada kami dan dengan sarana prasarana seperti alat mesin tenun, benang serta kain sutera yang kami terima kami berusaha memanfaatkan dengan baik dan mengelola dengan baik agar kami dapat memproduksi tenunan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pasar dunia” (wawancara dengan 27 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memproduksi tenunan yang lebih berkualitas lagi sehingga keuangan masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya .

Hasil wawancara selaku IT selaku masyarakat penenun yang menyatakan bahwa:

“Bantuan sarana dan prasarana yang pemerintah berikan membantu kami dalam menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan sesuai dengan pesanan pelanggan sehingga hasil produk kami memuaskan sesuai dengan keinginan para konsumen” (wawancara dengan IT 27 Juni 2017).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat sudah terbantu dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi sehingga masyarakat dapat memproduksi hasil tenun yang lebih

berkualitas lagi dan hasil produk mereka memuaskan sesuai pesanan para konsumen.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dilihat dari indikator infrastruktur sudah tercapai karena adanya kerjasama antara BUMN dan Dinas Koperasi dimana Dinas Perindustrian menyediakan perlengkapan sesuai kebutuhan masyarakat penenun di UPT sehingga usaha mereka berjalan dengan lancar dan Dinas Koperasi memberikan dana untuk membeli semua perlengkapan yang dibutuhkan di UPT.

Bentuk –bentuk peran pemerintah penenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas tenun dari segi infrastruktur adanya bantuan fasilitas yaitu UPT serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan masyarakat penenun yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat penenun sehingga usaha masyarakat bisa berjalan dengan lancar yang harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pesanan para konsumen.



Proses pembuatan kain tenun tradisional



Proses pembuatan kain tenun tradisional



Proses pembuatan kain tenun modern

Peran pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari segi indikator infrastruktur sudah adanya perlengkapan atau alat mesin tradisional yang disediakan oleh pihak yang berwenang dulunya masyarakat penenun menghasilkan produksi dengan cara duduk bersilah dan pinggangnya diikat dengan alat tenun itu sendiri dan adanya

kreatif masyarakat dan dibantu dengan pihak yang berwenang terbuatlah alat tenun yang duduk dan bisa dilakukan dengan berdiri.

Dapat dilihat dari kerjasama Dinas dan perbankan BUMN dalam bantuan dana sehingga di UPT sudah ada sebagian alat tenun mesin teknologi untuk masyarakat penenun dalam UPT tersebut untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan secara rutin untuk menghasilkan produksi yang lebih cepat dan berkualitas dari sebelumnya dan masyarakat penenun sudah terbantu karena adanya UPT tempat pelayanan dalam mengereasikan motif sesuai dengan pesanan para pelanggan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian kualitatif yang telah diterapkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam pemberdayaan penenun tradisional di Kabupaten

Wajo:

Koordinator belum optimal dikarenakan penyediaan waktu dan pelatihan dari UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sangat terbatas sehingga usaha masyarakat penenun tidak berjalan sesuai dengan keinginan, Fasilitator sudah berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat penenun karena sudah adanya wadah yang disediakan dan pembinaan serta berupa perlengkapan sehingga usaha masyarakat berjalan dengan lancar dan produk yang dihasilkan sesuai dengan pesanan pelanggan, Stimulator sudah terealisasi dimana dalam hal mempromosikan produk masyarakat penenun sudah tidak sulit lagi karena adanya kerjasama antara Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi serta Masyarakat dalam pembuatan brosur-brosur, wadah serta tempat pameran.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan penenun tradisional di KabupatenWajo:

A. Faktor Internal

- a) **Kelembagaan dan SDM:** Sudah terealisasi dengan baik karena adanya Workshop, Diklat serta Sosialisasi untuk peningkatan

pengetahuan dan keterampilan, peningkatan mutu produk yang kompotitif sehingga produk yang masyarakat hasilkan lebih berkualitas dari sebelumnya serta adanya motivasi dari Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi sehingga usaha semakin meningkat.

- b) **Pemasaran dan Teknologi:** Belum optimal karena masih kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai alat teknologi yang disediakan dan masih kurangnya pemahaman dalam mempromosikan hasil tenun.
- c) **Modal Intelektual:** Belum optimal dikarenakan masih terkendala di penggunaan teknologi informasi sehingga masih sulit mempromosikan hasil tenun mereka melalui sosial media.

B. Faktor Eksternal

- a) **Infrastruktur:** sudah terealisasi dengan baik karena dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi sehingga usaha masyarakat penenun berjalan dengan lancar.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penenun Tradisional di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, adapun beberapa saran agar masyarakat penenun semakin berdaya, yaitu:

1. Dinas Perindustrian harus selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat penenun agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan

harapan termasuk dalam pelatihan, pembinaan maupun memberikan pengetahuan agar usaha masyarakat semakin meningkat.

2. Dinas Koperasi juga ikut berpartisipasi dalam usaha ini mengenai masalah bantuan dana agar masyarakat penenun lebih termotivasi lagi dalam menjalankan usahanya dikarenakan adanya bantuan dana sehingga apa yang diperlukan masyarakat dapat terwujud.

3. Masyarakat penenun harus lebih kreatif lagi serta banyak melibatkan diri dalam sosialisasi dari dinas perindustrian yang bekerja sama dengan dinas koperasi, agar produksinya lebih meningkat sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- .Akbar.2016. Proposal: *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Aziz. Moh. Ali, dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma: Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- , 2008. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2011. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohani. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dilivery. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fahmi Irham. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Alfabeta.
- Haris Abdul. 2003. Skripsi: *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tenun Sutra di Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Jumhur, A. A. 2001. *Model Pengembangan Industri Kecil; Makalah Seminar Nasional Teknik Industri "Peran dan Profesi Teknik Industri Dalam Mewujudkan Kemandirian Usaha Kecil dan Menengah"*. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2005. *Pembaharuan dan Pemberdayaan*, Ikatan Alumni ITB.
- Keputusan Bupati No.43/KPTS/XII/2007 tentang pembentukan Silk Solution Centre(SSC) Persuteraan Alam Wajo.
- Labolo, Muhadam. 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: PT Raja Graffindo Persada.
- Ndraha, Talizidhulu. 2000. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- No.154/KPTS/VI/2000 tentang Tim Pembinaan dan Pengembangan Persuteraan Alam Kabupaten Wajo
- Purwanto. 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rivai Veitzal, Muliadi Dedi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Raja Graffindo Persada.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung: Manda Maju.

- Siagian. 2009. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekamto. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sondang. 2001. *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi. 1997. *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Lembaga Studi Pembangunan STKS*, Bandung.
- , 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- Suharto. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Rafika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2005. *Ekonomitrika Pengantar*, Jakarta: BPFE.
- Suroso. 2007. *Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta: Gramedia.
- Syafiie Kencana, dkk. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wilantara, Rio, Susilawati. 2016. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung: Rafika Aditama.
- Wrihatnolo, R. R. dan Riant Nugroho Dwijowitono. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Ele Media Kupotindo.

INTERNET

Wajo(http://www.wajokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=422, Jum'at 30 Desember 2016, 22.27 WIB).

@mfadilabdullah | M Fadil Abdullah | Mas Template Copyright © 2011. Science Student - All Rights Reserved.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Tenri Sumpala, disapa Tenri. Lahir pada tanggal 01 Oktober 1994 di Tarumpakkae, Sulawesi Selatan. Anak terakhir dari 3 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Dg. Palallo dan Hj. Junuhati. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK selama 2 Tahun dan enam Tahun di SDN 231 Li dan selesai pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTS DDI Tarumpakkae dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Puteri As'adiyah Sengkang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamal memberikan manfaat.